JNKA | Jurnal Nuansa Karya Akuntansi
Vol. 3, No. 1, April 2025, Hal 93-110 | e-ISSN : 2988-2702 (Online)
https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka

Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022

Jesse Stellani Mofu[1*], **Fefri Indra Arza**[2]
[1,2] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
*Korespondensi: jessemf18@gmail.com

Abstract
This study aims to examine the effect of fiscal decentralization (as proxied by regional independence, dependence on central government and effectiveness) and local government performance on financial reporting accountability in local governments in Papua for the 2021-2022 period. This research is a quantitative study using secondary data. The sampling technique used purposive sampling. The number of samples during the study year amounted to 50 data, which were analyzed using the IBM SPSS 25 application. The results showed that fiscal decentralization proxied through regional independence, dependence on central government and effectiveness had no positive effect on financial reporting accountability, but local government performance had a positive effect on financial reporting accountability in Papua in the 2021-2022 period.

Keywords*: Decentralization; Dependence; Effectiveness; Independence; Government.*

How to cite
Mofu, J. S., & Arza, F. I. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2021-2022. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 3(1), 93-110. **DOI:** https://doi.org/10.24036/jnka.v3i1.76

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah daerah menyampaikan informasi keuangan yang tepat, relevan, dan transparan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini mencakup proses penyusunan, pengauditan, dan penyampaian laporan keuangan yang mencerminkan dengan tepat penggunaan dan pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah (Fitri dan Khotimah, 2022). Adapun Akuntabilitas pelaporan keuangan ini menjadi penting karena organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk menggunakan dana publik secara efisien dan bertanggung jawab (Suryanto, 2017) .

Situs resmi BPK menyebutkan, meski telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang melaporkan

bahwa BPK menemukan sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah terkait penyusunan anggaran belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya terkait alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan dan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, terjadi defisit anggaran pada belanja barang dan jasa di 12 OPD dan belanja modal di 8 OPD. Pengelolaan belanja hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat belum sesuai ketentuan yang berlaku, karena penetapan penerima hibah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. BPK menilai pelaksanaan paket belanja modal dan belanja jasa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjadi defisit sebanyak 47 paket pekerjaan senilai Rp12,22 miliar di 11 OPD, serta keterlambatan penyelesaian 13 paket pekerjaan di 6 OPD.

Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi Papua memperoleh opini WDP atas LKPD tahun 2022, setelah sebelumnya memperoleh opini WTP sebanyak delapan kali berturut-turut. Informasi ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK RI, Laode Nusriadi. Persoalan tersebut tampak pada penyajian data keuangan yang menunjukkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp1,57 triliun, di atas anggaran induk. Alhasil, Pemerintah Provinsi Papua pun telah menetapkan perubahan anggaran. Anggaran hasil revisi tersebut tidak disetujui DPRP dan tidak disahkan Menteri Dalam Negeri. BPK tidak dapat memastikan penyesuaian yang diperlukan atas kelebihan belanja tersebut karena pelaksanaan dan sifat belanja yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria, sehingga mempengaruhi gambaran anggaran Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022.

Peristiwa di Papua yang menyangkut akuntabilitas pelaporan keuangan menunjukkan bahwa, meskipun telah memperoleh opini WTP dan WDP, meningkatkan tata kelola dan pengawasan manajemen keuangan sangat penting untuk mencapai tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab. Desentralisasi fiskal menyebabkan terjadinya transfer keuangan yang besar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Syahrudin, 2006. Desentralisasi fiskal memberikan daerah kewenangan dan tugas yang lebih besar untuk membenarkan pengeluaran keuangan mereka kepada publik, menjadikan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sebagai mekanisme penting untuk memastikan pemanfaatan dana yang efisien, efektif, dan transparan (Syahrudin, 2006).

Mahsun (2016) mengartikan kinerja pemerintah daerah adalah sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan dijalankan secara efektif dalam mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi yang ditetapkan dalam rencana strategis suatu organisasi. Kinerja dapat didefinisikan sebagai keluaran yang dihasilkan dari suatu proses tertentu yang dijalankan oleh semua komponen organisasi dengan memanfaatkan sumber daya tertentu sebagai masukan. Pemerintah dianggap berfungsi dengan baik jika mengelola operasinya secara efektif untuk memastikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Akbar (2012) menegaskan bahwa era reformasi telah membentuk harapan akan akuntabilitas dan transparansi dalam kemajuan administrasi pemerintahan di Indonesia, yang sangat penting bagi kinerja pemerintah daerah yang optimal.

Studi ini berupaya menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan efektivitas pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Orisinalitas studi ini muncul dari penekanannya pada tanggung jawab pelaporan keuangan di Papua, yang didukung oleh teori keagenan.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori Keagenan awalnya dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan muncul dari hubungan antara agen dan prinsipal, di mana agen ditunjuk untuk

melaksanakan tugas tertentu atas nama prinsipal dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Prinsipal diharuskan memberi kompensasi kepada agen atas jasa yang diberikan. Konflik keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Keduanya bertujuan untuk mengoptimalkan laba dan mengurangi risiko. (Belkaouli, 2001 sebagaimana dikutip dalam Subhan, 2011).

Penerapan teori keagenan dalam pemerintahan daerah mulai berkembang sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999. Teori ini dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu hubungan antara pemerintah dengan legislatif dan hubungan antara legislatif dengan masyarakat. Penggunaan gagasan ini dapat meningkatkan efisiensi, tetapi sering kali juga mendorong perilaku oportunistik (Subhan, 2011). Hal ini terjadi karena agen memiliki informasi keuangan yang lebih lengkap daripada prinsipal, sehingga memungkinkan mereka mengeksploitasi kewenangannya untuk keuntungan pribadi.

Dalam teori keagenan, prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. Hubungan prinsipal-agen mengharuskan manajemen bertanggung jawab atas aset yang dipercayakan oleh prinsipal. Agen dapat dimintai pertanggungjawaban kepada prinsipal jika mereka berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal, dan jika prinsipal memiliki kapasitas untuk menghargai kinerja agen atau menghukum agen karena gagal memenuhi kewajibannya (Kholmi, 2011).

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal memerlukan pendelegasian wewenang kepada entitas regional untuk menghasilkan pendapatan, menerima transfer dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, dan pelaksanaan otonomi pengeluaran dan investasi rutin. Akibatnya, desentralisasi fiskal berupaya meningkatkan otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan (Litvacj didalam Kurniawan (2010).

Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui pajak dan retribusi yang merupakan sumber pendapatan daerah. Peningkatan otonomi daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD). Dengan demikian, kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam menyalurkan PAD sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan tujuan pembangunan daerah (Mahmudi, 2010:8).

Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Ketergantungan pada pemerintah pusat dinilai dengan membandingkan pendapatan transfer yang diterima daerah dengan total pendapatan daerah (Mahmudi 2016:140). Pendapatan transfer meliputi penerimaan kas dari pemerintah provinsi, meliputi pendapatan bagi hasil pajak, dan dari pemerintah pusat, termasuk pembayaran perimbangan dan penyesuaian. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa dana perimbangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi kebutuhan daerah yang terkait dengan pelaksanaan program daerah.

Efektivitas

Efektivitas dalam studi ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kemampuan daerah untuk mengkaji aliran pendapatan yang ada dan meningkatkan prospek pendapatan untuk fungsi pemerintahan (Mudhofar & Tahar 2016). PAD terdiri dari dana yang bersumber dari

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah (Mahmudi 2016).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pada dasarnya menggambarkan tingkat keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang ditujukan untuk memenuhi tujuan, visi, dan misi organisasi, khususnya dalam perumusan strategi di dalam organisasi (Bastian, 2006). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 menetapkan pedoman penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah (PPD) yang berfungsi sebagai mekanisme penilaian kinerja pemerintahan daerah, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan mengukur keberhasilan penilaian kinerja. PPD merupakan metodologi pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kapasitas otonomi daerah, dan kelengkapan komponen pemerintahan di setiap daerah.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Akuntabilitas dinilai sebagai kepercayaan publik berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh entitas tertentu. Hal ini dapat menjadi dasar untuk studi selanjutnya, yang selanjutnya akan bertindak sebagai standar untuk efektivitas organisasi publik (Wicaksono, 2015). Akuntabilitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kewajiban pemerintah kepada publik untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan secara akurat semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Pelaporan keuangan mencakup semua elemen yang terkait dengan penyediaan dan penyajian informasi keuangan, termasuk penetapan standar, badan pengatur yang memastikan kepatuhan, dan entitas pelapor (Muraiya & Nadirsyah, 2018).

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Syahruddin (2006) menegaskan bahwa desentralisasi fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mencari pendanaan secara mandiri, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penyedia dana (investor dan kreditor) akan menyetujui pendanaan asalkan pemerintah daerah menunjukkan akuntabilitas yang kuat. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Fontanella (2014) menemukan bahwa Desentralisasi Fiskal, yang didefinisikan oleh Kemandirian Daerah dan Kinerja Pemerintah, berdampak positif terhadap kemungkinan peningkatan Akuntabilitas dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Mudhofar dan Tahar (2016) menegaskan bahwa kemandirian daerah secara positif memengaruhi pelaporan keuangan, karena otonomi daerah yang ditingkatkan memungkinkan pembiayaan pengeluaran secara independen, sehingga memfasilitasi akuntabilitas dan pengungkapan operasi yang komprehensif. Hipotesis dasar didasarkan pada berbagai alasan dari penelitian sebelumnya dan bukti empiris mengenai desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Teori yang diajukan adalah:

H_1: Tingkat kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Desentralisasi fiskal biasanya meningkatkan tanggung jawab pelaporan keuangan suatu daerah, khususnya terkait otonomi dan ketergantungannya pada pemerintah pusat (Fontanella 2014). Pemerintah daerah menunjukkan kapasitas yang terbatas baik dalam kondisi independen maupun tergantung terhadap pemerintah federal; jadi, pemerintah daerah harus

meningkatkan kemampuannya untuk menjalankan operasi keuangannya sendiri, termasuk pengaturan dan eksplorasi potensi keuangan penganggaran dan alokasi. Lay (2001) menegaskan bahwa ketika pemerintah daerah mencapai otonomi sebagai entitas pemerintahan dan tidak tergantung pada aturan dan bantuan pemerintah pusat, hal itu mendorong peningkatan dan pengelolaan potensi budaya lokal yang lebih progresif. Model tata kelola terdesentralisasi, yang mengalokasikan kewenangan untuk manajemen daerah otonom, dianggap mampu memberikan layanan publik secara lebih efisien, sehingga meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat pun semakin berkurang, sehingga akuntabilitas daerah semakin meningkat. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H_2: Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

Pengaruh Tingkat Efektivitas Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai anggaran PAD yang diproyeksikan. Hal ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah dapat memperoleh aliran pendapatan dan meningkatkan alokasi pendapatan untuk operasi pemerintahan. Tujuan peningkatan otonomi keuangan daerah adalah untuk mengelola dan memungut pajak dan retribusi daerah secara mandiri, sebagaimana diutarakan oleh Moisiu (2013) dan Mudhofar dan Tahar (2016). Organisasi sektor publik dianggap efektif jika uang yang dihasilkan memenuhi atau melampaui tujuan yang ditetapkan. Jika efektivitas pendapatan meningkat, kinerja keuangan daerah akan dianggap luar biasa. Kinerja keuangan yang baik akan mempengaruhi persepsi pemerintah daerah (Khairudin, 2013). Temuan penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Khotimah (2022). Penulis memaparkan hipotesis ketiga yang didasarkan pada logika dan bukti empiris tentang desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pelaporan keuangan:

H_3: Tingkat efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Fontanella dan Rossieta (2014) berpendapat bahwa peningkatan kinerja administrasi pemerintahan daerah dikaitkan dengan kemungkinan lebih besar daerah mencapai akuntabilitas pelaporan keuangan yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh opini audit yang positif. Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan keuangan yang mengutamakan pencapaian hasil (output) berdasarkan perencanaan alokasi biaya (input) yang telah ditetapkan sebelumnya (Syahruddin, 2006; Mudhofar & Tahar, 2016). Mudhofar dan Tahar (2016) menegaskan bahwa kinerja administrasi pemerintahan daerah mencerminkan tingkat efisiensi, efektivitas, penghematan, dan produksi. Penulis mengajukan hipotesis keempat yang didasarkan pada argumen dan fakta aktual tentang desentralisasi fiskal dan akuntabilitas pelaporan keuangan:

H_4: Kinerja Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metodologi yang berlandaskan pada filsafat positivis,

yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang dipilih melalui instrumen penelitian dan analisis statistik, dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau menguji hipotesis yang mendasari penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif untuk mengevaluasi pengaruh desentralisasi fiskal dan kinerja pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah di Papua selama tahun 2021-2022, dengan memanfaatkan data yang diperoleh dari situs web resmi BPK RI dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi 42 kabupaten dan kota yang terletak di Papua. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2019:138). Kriteria sampel yang dipilih adalah: Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Papua, yang memiliki data LHP LKPD dari BPK RI, yang memiliki data Hasil Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah yang memberikan informasi lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini berjumlah 25 Kabupaten/Kota di Papua, dengan durasi penelitian selama 2 tahun (2021-2022), sehingga jumlah sampel penelitian sebanyak 50 sampel.

Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini memanfaatkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dokumen, antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD), hasil penilaian kinerja pemerintah daerah dari BPK, informasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta data LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua Barat dan data EKPPD dari Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan strategi dokumentasi untuk pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen, antara lain laporan hasil pemeriksaan LKPD, hasil penilaian, dan hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah yang bersumber dari BPK dan situs web Kementerian Dalam Negeri.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengungkapan keuangan daerah. Mardiasmo (2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang dimungkinkan melalui langkah-langkah akuntabilitas secara berkala. Akuntabilitas pelaporan keuangan berkaitan dengan kewajiban pemerintah kepada publik untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan secara akurat semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi. Variabel dependen dalam penelitian ini dievaluasi melalui opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Fontanella dan Rossieta 2014). Opini audit dalam penelitian ini akan dievaluasi menggunakan skala ordinal yang mengurutkan opini dari terendah hingga tertinggi sebagai berikut :

1=Tidak Menyatakan Pendapat (TMP),
2=Tidak Wajar (TW),
3=Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
4=Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Variabel Independen

Kemandirian daerah

Kemandirian daerah merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi desentralisasi fiskal, yang ditentukan dengan membandingkan volume pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, di samping pinjaman daerah (Mahmudi, 2016). Pada saat yang sama, kemandirian daerah dapat diukur melalui rumus berikut:

$$\text{Kemandirian Daerah} = \frac{Pendapatan\ Asli\ Daerah\ (PAD)}{Pendapatan\ Transfer\ PP, Provinsi + Pinjaman\ daerah} x\ 100\%$$

Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Ketergantungan pada pemerintah pusat mengacu pada situasi di mana pemerintah daerah sangat bergantung pada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan dan bantuan keuangan mereka. Penelitian Mudhofar dan Tahar (2016) menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dievaluasi dengan membandingkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap total pendapatan daerah. DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang ditujukan untuk menyeimbangkan dana antardaerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang diperuntukkan bagi daerah tertentu untuk membiayai inisiatif yang sejalan dengan program prioritas nasional. Penelitian Mudhofar & Tahar (2016) mengukur Ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KPPP = \frac{Pendapatan\ Transfer}{Total\ Pendapatan} x\ 100\%$$

Efektivitas

Efektivitas dalam penelitian ini berkaitan dengan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam memenuhi anggaran PAD. Hal ini menggambarkan sejauh mana daerah dapat menganalisis sumber pendapatan untuk memaksimalkan penggunaan dana bagi fungsi pemerintahan (Mudhofar & Tahar 2016). Mahmudi (2016: 141) mengartikan realisasi adalah pelaksanaan nyata, rasio efektif ini dapat dinilai dengan membandingkan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan tujuannya. Rumus untuk mengetahui efektivitas digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PAD}{Target\ Penerimaan\ PAD} x\ 100\%$$

Kinerja Pemerintah Daerah

Variabel Kinerja Pemerintah Daerah diwakili oleh skor Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD menggambarkan kinerja kepala daerah dalam kurun waktu satu tahun, sehingga memerlukan penyusunan oleh orang yang kompeten dalam menyajikan data dan mengkarakterisasi status daerah, meliputi pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, pendapatan, belanja, dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penilaian Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi menjadi lima klasifikasi, yaitu:

a) 1.80 = Sangat Rendah (SR)
b) 1.81 – 2.60 = Rendah (R)

c) 2.61 – 3.40 = Sedang (S)
d) 3.41 – 4.20 = Tinggi (T)
e) 4.21 – 5.00 = Sangat Tinggi (ST).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang variabel yang diteliti dengan mengevaluasi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku. Hasil analisis deskriptif ditampilkan dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian daerah	50	.01	.28	.0498	.06422
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	50	.75	.99	.9298	.05648
Efektivitas	50	.09	1.70	.8951	.31729
Kinerja Pemerintah daerah	50	.07	2.67	1.6718	.68481
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan	50	1	4	3.72	.671
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa ukuran sampel (N) terdiri dari 50 individu. Sampel tersebut ter di Kota Padang. Gambaran responden yang dilakukan dalam penelitian berdasarkan tabel, diketahui bahwa terdapat 5 variabel secara keseluruhan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai terkecil untuk variabel kemandirian daerah adalah 0,01, sedangkan nilai terbesar adalah 0,28. Nilai rata-rata kemandirian daerah adalah 0,498, dengan simpangan baku 0,6422. Hal ini menunjukkan bahwa deviasi standar melampaui nilai rata-rata independensi regional. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tertentu mungkin menunjukkan kemandirian yang signifikan, sedangkan daerah lain mungkin sangat bergantung pada sumber pembiayaan eksternal, termasuk pendapatan transfer dari pemerintah nasional dan pinjaman daerah tambahan.

Variabel dependen yang terkait dengan pemerintah pusat memiliki nilai minimum 0,75, nilai maksimum 0,99, dan nilai rata-rata 0,9298. Deviasi standarnya adalah 0,05648. Rata-rata yang tinggi (0,9298) juga memperkuat pandangan bahwa mayoritas daerah sangat mengandalkan pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

Variabel efektivitas deskriptif menunjukkan bahwa efikasi PAD terkecil adalah 0,09, maksimum 1,70, dan rata-rata efektivitas 0,8951. Simpangan baku 0,31729. Rata-rata efektivitas sebesar 0,8951 mendekati angka 1, yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan, daerah-daerah tersebut cukup mampu memaksimalkan potensi PAD mereka, meskipun ada variasi di antara mereka.

Variabel kinerja pemerintah daerah memiliki nilai minimum 0,07, nilai maksimum 2,69, dan nilai rata-rata 1,6718. Simpangan baku 0,671. Nilai rata-rata 1,6718 menandakan bahwa kinerja administrasi pemerintah daerah berada pada kategori Rendah (R). Hal ini

menandakan bahwa sebagian besar daerah menunjukkan kinerja yang kurang optimal dan memerlukan peningkatan yang substansial. Berdasarkan data tersebut, maka Secara umum, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Papua sebagian besar berada dalam kategori Rendah (R), dengan beberapa daerah menunjukkan kinerja yang sangat rendah.

Variabel akuntabilitas pelaporan keuangan menunjukkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan di pemerintah daeaarah di Papua menunjukkan nilai minimal 1 dan maksimum 4, dengan rata-rata nilai sebesar 3,72. Simpangan baku 0,671. Simpangan baku 0,671 menandakan variabilitas yang cukup besar dalam kualitas pelaporan keuangan di berbagai wilayah. Meskipun rata-rata tersebut diklasifikasikan dalam kategori WDP, terdapat perbedaan yang mencolok di antara laporan keuangan yang memperoleh opini TMP, WDP, dan WTP.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam model regresi mengevaluasi apakah variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal. Nilai residual dianggap mengikuti distribusi normal dalam uji-t dan uji-F. Jika distribusi residual normal, garis optimal yang mewakili data adalah garis diagonal. Penilaian normalitas non-parametrik. Uji Kolmogorov-Smirnov (K-V) menyatakan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (5%) menunjukkan bahwa data residual terdistribusi secara teratur (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk mengevaluasi kenormalan dengan menganalisis nilai signifikansi eksak, bukan nilai signifikansi asimtotik. Hipotesis nol akan diuji, yang menegaskan bahwa sampel berasal dari populasi yang terdistribusi normal, berbeda dengan hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa populasi tidak terdistribusi normal. Hasil analisis data uji kenormalan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.60394882
Most Extreme Differences	Absolute	.178
	Positive	.095
	Negative	-.178
Test Statistic		.178
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000[c]
Exact Sig. (2-tailed)		.074
Point Probability		.000

Sumber: data statistik diolah, 2024

Uji Kolmogorov-Smirnov Satu Sampel menunjukkan bahwa residual tak terstandar dari data yang dianalisis memiliki ukuran sampel 50, rata-rata 0, dan simpangan baku 0,60394882. Perbedaan absolut maksimum adalah 0,178, yang terdiri dari nilai positif 0,095 dan nilai negatif 0,178. Hasil uji statistik adalah 0,178, disertai dengan nilai signifikansi eksak.

Signifikansi dua sisi adalah 0,074. Oleh karena itu, karena 0,074 melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan korelasi substansial di antara variabel independen tertentu atau semua variabel dalam model regresi. Jika terdapat multikolinearitas, koefisien regresi menunjukkan ketidakpastian, tingkat kesalahan meningkat tajam, dan kondisi ini biasanya ditandai dengan koefisien determinasi yang sangat tinggi; meskipun demikian, dalam pengujian parsial, koefisien regresi mungkin dapat diabaikan atau tidak ada. Hasil penilaian multikolinearitas ditunjukkan oleh nilai toleransi dan faktor inflasi varians (VIF), yang berfungsi sebagai indikator keberadaan atau ketidakberadaan multikolinearitas di antara variabel independen. Kriteria untuk mendeteksi multikolinearitas adalah toleransi yang melebihi 0,1 atau faktor inflasi varians (VIF) di bawah 10. Hasil selanjutnya dari penilaian multikolinearitas disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kemandirian daerah	.178	5.608
Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	.179	5.587
Efektivitas	.955	1.047
Kinerja Pemerintah daerah	.925	1.082

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Hasil penilaian multikolinearitas dengan menggunakan Variance Inflation Factors (VIF) menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10. Secara spesifik, Kemandirian Daerah memiliki VIF sebesar 5,608, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat memiliki VIF sebesar 5,587, Efektivitas memiliki VIF sebesar 1,047, dan Kinerja Pemerintah Daerah memiliki VIF sebesar 1,082. Nilai toleransi pada model ini melebihi 0,1, yaitu kemandirian daerah memiliki nilai toleransi sebesar 0,178, ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki nilai toleransi sebesar 0,179, efektivitas sebesar 0,955, dan kinerja pemerintah daerah sebesar 0,925. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen menunjukkan korelasi yang kecil satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa model tersebut bebas dari multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas tidak terjadi dalam model regresi ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, heteroskedastisitas terjadi ketika nilai signifikansi di bawah 0,05 (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan uji Spearman Rho untuk mengevaluasi heteroskedastisitas, dengan temuan yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Uji Heterokedastisitas
Correlations

			Kemandirian Daerah	Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	Efektivitas	Kinerja Pemerintah Daerah	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Kemandirian Daerah	Correlation Coefficient	1.000	-.747**	-0.014	.481**	-0.105
		Sig. (2-tailed)		0.000	0.925	0.000	0.466
		N	50	50	50	50	50
	Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	Correlation Coefficient	-.747**	1.000	-0.018	-.301*	0.183
		Sig. (2-tailed)	0.000		0.899	0.034	0.203
		N	50	50	50	50	50
	Efektivitas	Correlation Coefficient	-0.014	-0.018	1.000	0.001	0.094
		Sig. (2-tailed)	0.925	0.899		0.993	0.515
		N	50	50	50	50	50
	Kinerja Pemerintah Daerah	Correlation Coefficient	.481**	-.301*	0.001	1.000	-0.176
		Sig. (2-tailed)	0.000	0.034	0.993		0.221
		N	50	50	50	50	50
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-0.105	0.183	0.094	-0.176	1.000
		Sig. (2-tailed)	0.466	0.203	0.515	0.221	
		N	50	50	50	50	50

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Variabel independensi regional menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,105 dan nilai signifikansi dua sisi sebesar 0,466. Nilai signifikansi sebesar 0,466 yang melebihi 0,05 menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas antara independensi regional dan residual. Demikian pula, variabel lain, termasuk ketergantungan pada pemerintah pusat, efikasi, dan kinerja administrasi daerah, masing-masing menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05, yaitu 0,203, 0,515, dan 0,221. Hal ini menandakan bahwa tidak satu pun dari variabel ini yang menunjukkan masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.437[a]	.191	.119	.630	1.765

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang disajikan pada Tabel 5, kondisi dU < d < 4 – dL terpenuhi. Durbin-Watson d dalam tabel model summary menunjukkan angka 1,765, sementara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) menunjukkan angka masing-masing 1,7214 dan 1,3779 yang didapatkan dari tabel DW (α=5%) dengan jumlah 4 variabel X dan N=50. Maka, berdasarkan persamaan tersebut didapatkan hasil 1,7214 < 1,765 < 4-1,3779 atau 1,7214 < 1,765 < 26621. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6.
Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.316	3.717		2.237	.030
	Kemandirian Daerah	-2.349	3.320	-.225	-.708	.483
	Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-5.168	3.768	-.435	-1.372	.177
	Efektivitas	-.218	.290	-.103	-.750	.457
	Kinerja Pemerintah Daerah	.311	.137	.318	2.278	.028

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan
Sumber: data statistik diolah, 2024

Berdasarkan informasi diatas, maka berikut adalah persamaan persamaan regresi linear berganda yang dapat dibentuk:

$$Y = 8{,}316 – 2{,}349X1 – 5{,}168X2 -0{,}218X3 + 0{,}311X4 + e$$

Angka tetap 8,316 menandakan bahwa ketika semua variabel independen (X1, X2, X3, X4) adalah nol, nilai Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang diantisipasi adalah 8,316. Koefisien untuk variabel Kemandirian Daerah (X1) adalah -2,349, menandakan bahwa peningkatan satu unit dalam Kemandirian Daerah akan menghasilkan hilangnya 2,349 dalam

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, asalkan semua faktor lainnya tetap konstan. Meskipun demikian, nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,483, di atas 0,05, menunjukkan bahwa efek ini tidak signifikan secara statistik. Koefisien untuk Ketergantungan pada Pemerintah Pusat (X2) adalah -5,168, yang menunjukkan bahwa kenaikan satu unit dalam Ketergantungan pada Pemerintah Pusat akan menghasilkan penurunan 5,168 dalam Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, asalkan variabel lain tetap konstan. Meskipun demikian, nilai signifikansi 0,177, yang melebihi 0,05, menunjukkan bahwa efek ini tidak signifikan secara statistik. Koefisien untuk Efektivitas (X3) adalah -0,218, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu unit dalam Efektivitas menghasilkan penurunan 0,218 dalam Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Nilai signifikansi 0,457 menunjukkan bahwa efek ini tidak memiliki signifikansi statistik. Nilai koefisien 0,311 untuk Kinerja Pemerintah Daerah (X4) menunjukkan bahwa kenaikan satu unit dalam Kinerja Pemerintah Daerah akan menghasilkan peningkatan 0,311 dalam Akuntabilitas Pelaporan Keuangan, dengan asumsi semua variabel lain tetap konstan. Nilai signifikansi sebesar 0,028, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. Akibatnya, dari semua variabel independen, hanya variabel Kinerja Pemerintah Daerah (X4) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan pada tingkat signifikansi 5%.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.437[a]	.191	.119	.630	1.765

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Tabel 7 menunjukkan nilai R Square sebesar 0,191 yang mengindikasikan bahwa 19,1% varians Akuntabilitas Pelaporan Keuangan (Y) dijelaskan oleh variabel independen dalam model (Kemandirian Daerah, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Efektivitas, dan Kinerja Pemerintah Daerah). Faktor-faktor tambahan yang tidak dimasukkan dalam model ini menyumbang 80,9% dari varians residual. Nilai R-kuadrat yang disesuaikan adalah 0,119, sedikit lebih rendah dari R Square, menunjukkan bahwa jumlah variabel dalam model telah dipertimbangkan, hanya sekitar 11.9% variasi dalam Akuntabilitas Pelaporan Keuangan yang dijelaskan oleh model. Adjusted R Square memberikan gambaran yang lebih realistis tentang seberapa baik model ini cocok dengan data, terutama jika banyak variabel independen yang tidak signifikan.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.207	4	1.052	2.648	.045[b]

Residual	17.873	45	.397
Total	22.080	49	

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Kinerja Pemerintah Daerah, Efektivitas, Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Kemandirian Daerah

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Nilai F pada Tabel 8 lebih besar dari 1, yang berarti bahwa faktor-faktor independen memiliki pengaruh besar terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Nilai signifikansi sebesar 0,045, yang lebih kecil dari 0,05, berarti bahwa model regresi yang digunakan dianggap tepat untuk penelitian tersebut. Ini berarti bahwa variabel-variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara keseluruhan dengan baik. Ini berarti bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.316	3.717		2.237	.030
	Kemandirian Daerah	-2.349	3.320	-.225	-.708	.483
	Ketergantungan pada Pemerintah Pusat	-5.168	3.768	-.435	-1.372	.177
	Efektivitas	-.218	.290	-.103	-.750	.457
	Kinerja Pemerintah Daerah	.311	.137	.318	2.278	.028

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Sumber: Data statistik diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 9, nilai signifikansi variabel independensi daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas masing-masing adalah 0,483, 0,177, dan 0,457. Nilai signifikansi tersebut melampaui 0,05, yang menunjukkan bahwa tidak satu pun dari variabel tersebut yang memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. Adapun nilai Koefisien untuk kemandirian daerah menunjukkan negatif (-708), yang berarti hubungan antara Kemandirian Daerah dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan adalah negatif, demikian juga dengan variabel ketegantungan pada pemerintah pusat dan efektivitas yang menunjukkan nilai koefisien -5168 dan -0,218. Variabel independensi regional berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan, ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,028 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai koefisien sebesar 0,311. Hipotesis H1, H2, dan H3 ditolak, namun H4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Uji hipotesis awal penelitian ini menunjukkan bahwa independensi daerah tidak

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan otonomi keuangan daerah tidak serta merta meningkatkan kualitas atau transparansi pelaporan keuangan daerah. Faktor-faktor pelengkap dapat secara substansial memengaruhi peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muafiq & Rizal (2023) dan Friyani (2017) yang menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal, sebagaimana dilambangkan oleh otonomi daerah, tidak memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian Friyani (2017) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum berjalan dengan baik karena masih berfokus pada belanja daerah, sedangkan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pajak masih terbatas dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan tidak terdapat bukti empiris yang mendukung keterkaitan antara ketergantungan pada pemerintah pusat dengan akuntabilitas pelaporan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Erryana dan Setyawan (2016) dan Tya Mardiathi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Erryana dan Setyawan (2016) menegaskan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai berdasarkan opini yang diberikan oleh auditor pemerintah di BPK. Temuan pemeriksaan BPK tidak dikaitkan dengan ketergantungan daerah maupun besarnya DAU dan DAK yang dialokasikan untuk pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, meskipun ketergantungan pemerintah kabupaten dan kota di Papua cukup tinggi, yakni rata-rata 94%, namun tidak berarti terjadi salah alokasi dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat.

Pengaruh Efektivitas terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Uji hipotesis konklusif menunjukkan bahwa tidak ada hubungan substansial antara efektivitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian K Mudhofar dan Tahar (2016) yang menunjukkan bahwa efektivitas tidak memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan. Meskipun PAD terbukti efektif dalam membantu pemerintah menggali sumber pendapatan dan mengoptimalkan potensi daerah (Mudhofar & Tahar, 2016), namun tidak menunjukkan dampak positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Pengaruh tersebut dapat muncul dari beberapa unsur yang mempengaruhi pencapaian PAD, antara lain kesiapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perubahan kebijakan, dan motivasi politik. Kondisi ini sering dikaitkan dengan ketidakpastian lingkungan, yang menimbulkan ambiguitas pekerjaan dan mempengaruhi akuntabilitas Pemerintah Daerah (Wijaya dan Akbar, 2013 dalam Mudhofar & Tahar, 2016).

Pengaruh Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Uji hipotesis keempat menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Kinerja pemerintah daerah yang unggul berkaitan dengan akuntabilitas pelaporan keuangan yang lebih baik. Peningkatan kinerja pemerintah daerah akan menghasilkan transparansi, ketepatan, dan integritas yang lebih baik dalam pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014), Mudhofar & Tahar (2016), dan Matilde dan Sari (2021), yang

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Matilde dan Sari (2021) menegaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintah daerah akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan, yang menunjukkan bahwa keuangan daerah dikelola secara hati-hati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah yang sedang berjalan akan dipersepsikan positif oleh masyarakat terhadap pembangunan daerah yang sejalan dengan harapan publik, sehingga memotivasi upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh desentralisasi fiskal dan efektivitas pemerintah daerah terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan pada kabupaten dan kota di Papua tahun 2021-2022. Hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang dicirikan oleh tiga variabel, yaitu kemandirian daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas, tidak memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pada kabupaten dan kota di Papua tahun 2021-2022. Secara bersamaan, otonomi daerah memengaruhi tanggung jawab pelaporan keuangan secara positif di kabupaten dan kota di Papua selama tahun 2021-2022.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki kendala yang dapat memengaruhi hasil penelitian yang dicapai. Keterbatasan tersebut meliputi hal-hal berikut. Penerapan teknik pengambilan sampel purposif tertarget dalam penelitian ini membatasi generalisasi sampel penelitian ke populasi yang lebih luas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor otonomi daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat, dan efektivitas serta kinerja pemerintah daerah hanya mencakup 19,1% varians akuntabilitas pelaporan keuangan di Papua selama tahun 2021-2022. Peneliti mengantisipasi adanya elemen tambahan yang dapat memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan metodologi penelitian lain agar dapat menggeneralisasikan keseluruhan populasi penelitian dan memperluas cakupan penelitian hingga mencakup banyak kabupaten atau kota di berbagai provinsi di Indonesia, atau dapat meneliti seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. Selain itu, peneliti lain dapat memasukkan variabel yang menandakan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, termasuk tata kelola, sistem pengendalian internal, belanja modal, status regional, atau elemen lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyadi, Y., Fitrijanti, T., & Rosdini, D. (2019). WTP pada laporan keuangan pemerintah pusat Republik Indonesia: bagaimana meraih dan mempertahankannya. Proceeding of National Conference of Accounting, 1, 57–70. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol1.art6

Akbar, R. (2012). Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia. Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi, 13, 32-34.

BPK Provinsi Papua Barat, 2023. *Papua Barat Terima Opini WTP 9 Kali Berturut-Turut dari BPK.* Retrivied from https://papuabarat.bpk.go.id/papua-barat-terima-opini-wtp-9-kali-berturut-turut-dari-bpk/

Fitri, M., & Khotimah, H. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Pusat Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Keunis*, *10*(1), 1-12.

Fontanella, A., Padang, P. N., & Rossieta, H. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Paper Dipresentasikan pada Simposium Nasional Akuntansi XVII, Lombok.

Friyani, R. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Goof Governance, dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi). Jurnal Sains Sosiohumaniora, 1(2), 142–148..

Kementrian Dalam Negeri, https://ppid.kemendagri.go.id, 28 Maret 2024

Kholmi, M. (2011). Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).

Kurniawan Dhani. 2010. Otonomi Daearah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. Vol 7 No.2..

LP9/Red. (2022, Mei 17). *Raih WTP, 3 Kabupaten di Papua Barat dapat "Teguran' BPK*. Retrieved from linkpapua.com: https://linkpapua.com/raih-wtp-3-kabupaten-di-papua-barat-dapat-teguran-bpk/

Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mahsun, Mohamad. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE

Moisiu, A. (2013). *Decentralizations and The Increased autonomy in Local Governments, Procedia-Social and Behavioral Sciences.* pp.459-463

Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. Jurnal Akuntansi dan Investasi, 17(2), 176–185. https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.1 76-185

Muafiq, R. R., & Chariri, A. (2023). Desentralisasi Fiskal, Efektivitas Penyerapan Anggaran, Belanja Modal, Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah: Kinerja Pemerintah Daerah sebagai Variabel Moderasi. *Diponegoro Journal of Accounting*, *12*(4). Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/41597

Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 3(2), 236–253

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sari, M. A. O. D. P. (2021). Pengaruh kemandirian daerah, kinerja pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1), 186-193.

Subhan. (2011). Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Keuangan Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

Suryanto, 2010. Menyoal Desentralisasi Fiskal: Mempertanyakan Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Daerah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Diponegoro.

Suwardjono. 2005. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE UGM.

Syahruddin, 2006. Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan dan Implementasi Yang Konsisten. Skripsi, Universitas Andalas

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

Vinda Erryana dan Hendri Setyawan. 2016. Determinan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Indonesia.Vol 5 No.1 Januari 2016.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik), 19(1), 17. https://doi.org/10.22146/jkap.7523